

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Antikorupsi : Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fathurrahman. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- I Dewa Gede Palguna. 2018. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta : Konpress.
- Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta :
Konstitusi Press.

Ma'shum Ahmad. 2009. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman : Pasca
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Total Media.

Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia*.
Jakarta : Konstitusi Press.

P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

R. Wiyono. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK RI.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang :
Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana
Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

D. Jurnal, Makalah, Koran dan Skripsi

Dadin E. Saputra. 2018. "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum dan Pemikiran. Volume 18. Nomor 1.

Fatkurohman. 2017. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 1.

Frans H Winarta. *Korupsi Sektor Swasta*. Kompas. 30 Januari 2019. Halaman 6.

Kompas. 30 Januari 2019. *Pemberantasan Korupsi di Trek Benar*. Halaman 3.

Maruarar Siahaan. 2009. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum

Konstitusi”. *Jurnal Hukum*. Volume 3. Nomor 16 dapat diakses melalui

<https://scholar.google.co.id/citations?user=BOhrFM0AAAAJ&hl=en#d=g>

[s_md cita-](#)

[d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user](#)

[%3DBOhrFM0AAAAJ%26citation_for_view%3DBOHRFM0AAAAJ%3](#)

[AqjMakFHDy7sC%26tzom%3D-420](#)

Nike Beauty Lavenia. 2017. Tesis : *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian

Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Semarang : Universitas Diponegoro, dapat diakses melalui

http://eprints.undip.ac.id/61632/1/FILE_TESIS.pdf

Nofrianto. 2011. Skripsi : *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Nomor 003/PUU-*

IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-

Undang Dasar 1945. Padang: Universitas Andalas.

Wirman Hadi. 2013. Skripsi : *Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi*

dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia. Padang : Universitas Andalas.

Yochi Adi Guna. 2017. Skripsi : *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 Terkait

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Padang : Universitas Andalas.

E. Internet

<http://erepo.unud.ac.id/9313/3/9dfe3087b7ebfcbc05e733e4f37ad0cb.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/9011/2/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/12320/4/8.%20BAB%20II.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/265210-none-a3b4a37c.pdf>

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_dir/8ec9798edf556d7b317f0291edcad672.pdf

<http://eprints.undip.ac.id/61632/>

<https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf>

<http://digilib.unand.ac.id/12785/15/BAB%20II.pdf>

